ABSTRAK

Skripsi ilmu Hukum program sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Waris Atas Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 14/Pdt.G/2006 (Non Eksekutabel) yang dilatarbelakangi oleh sengketa tanah waris yang dialami para ahli waris, semula sengketa tidak timbul pada tahap pembagiannya. Sengketa timbul setelah tanah yang menjadi objek salah menyebutkan batas-batasnya sehingga terdapat hak orang lain dalam sengketa tersebut, yang mengakibatkan adanya non eksekutabel terhadap hasil putusan pokok tanah sengketa. Oleh karena itu, penulis berupaya mendalami permasalahan non eksekutabel ini dengan harapan dapat dijadikan bakal ilmu dimasa depan baik bagi penulis maupun masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi yang non eksekutabel, akibat hukum yang timbul, serta hambatan dan penyelesaian dari non eksekutabel.

*Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, menganalisis masalah, penelitian ini juga meninjau pelaksanaannya dalam praktek melalui studi kasus di Pengadilan Negeri Kendal. Teknik pengumpulan data menggunakan Buku-buku, UUD yang berkaitan serta ditambah dengan adanya studi lapangan. Hasil penelitian ini berkaitan dengan hasil persidangan akibat hukum dari non eksekutabel, yang biasanya memiliki alasan dan faktor tertentu menurut hukum acara perdata diantaranya adalah karena harta berada di luar negeri, objek yang salah, dll. Pada perkara nomor 14/pdt.G/2006 (non eksekutabel) ini yang menjadikan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara semestinya karena salah menjatuhkan putusan dimana objek yang seharusnya yaitu posita angka 7 tetapi yang disebut dalam putusan adalah posita angka 4. Oleh karena salah objek tersebut sehingga mengakibatkan non eksekutabel karena dalam eksepsi istilah *error in objecto* tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Akibat hukum apabila adanya non eksekutabel terhadap hasil persidangan yang timbul berbeda-beda, tergantung atas dasar apa perkara tersebut dinyatakan non eksekutabel dalam perkara nomor 14/pdt.G/2006 ini, sebab yang menyatakan perkara ini menjadi non eksekutabel yaitu tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya karena pada pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan di objek sengketa yang dimaksud tidak ditemukan sehingga menjadi non eksekutabel dan akibat hukumnya adalah eksekusi harus dihentikan.

Hambatan dan penyelesaiannya apabila terjadi non eksekutabel sangat banyak dan bervariasi mulai dari terekseskusi menolak untuk akan tetapi ketua pengadilan berhak mengambil keputusan apakah eksekusi tersebut tetap berlangsung atau menjadi non eksekutabel. Dalam melakukan gugatan baru atas penetapan eksekusi sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya eksekusi yang didalamnya terdapat salah objek dan juga tidak menyertakan Yatno sebagai suami dari Sulistyaningsih dalam pokok gugatan sehingga tidak ada kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan pengadilan.

Keynote : Non Eksekutabel, Sengketa Tanah Waris, Putusan Pengadilan